

PERUBAHAN RENCA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/JADWAL KEGIATAN						PENAGGUNG JAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4	JUMLAH	ANGGARAN	
1.	Terwujudnya Iklim investasi Yang Kompetitif		Peningkatan Realisasi Investasi	-	-	-	0,1	0,1		Kepala Dinas
		1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia				83,33	83,33	Rp. 10.787.500	Kepala Bidang Pengembangan
		1.1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)				1	1	Rp. 10.787.500	Penata Perizinan
		1.1.1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1	1	Rp. 10.787.500	Penata Perizinan
		2. Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan				75	75	Rp. 56.125.000	Kepala Bidang Pengembangan
		2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan				1	1	Rp. 56.125.000	Penata Penanaman Modal
		2.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1	1	Rp. 56.125.000	Penata Penanaman Modal
		2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM				3	3	Rp. 81.575.000	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
		2.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (laporan)	0	0	0	60	60	Rp. 81.575.000	
		2.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	10	10	4	34	Rp. 15.675.000	Penata Penanaman Modal

		2.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5	5	10	10	30	Rp. 30.090.000	Penata Penanaman Modal
		2.1.3 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	10	10	10	12	42	Rp. 35.810.000	Penata Penanaman Modal
		3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100	100	100	100	100	Rp. 76.637.500	Kepala Bidang Pengembangan
		3.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan				83,33	83,33	Rp. 76.637.500	Penata Penanaman Modal
		3.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3	3	3	4	13	Rp. 76.637.500	Penata Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,05		89,22	89,22		Kepala Dinas
		1. Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan				3	3	Rp. 220.625.080	Kepala Bidang Pelayanan
		1.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan	75	75	125	175	450	Rp. 220.625.080	Penata Perizinan
		1.1.1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	50	100	100	300	Rp. 213.165.200	Penata Perizinan

		1.1.2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25	25	25	75	150	Rp. 7.459.880	Penata Perizinan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP OPD	69,5				69,5		Kepala Dinas
		1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	100				100	Rp. 4.430.261.645	Sekretaris
			Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu		
		1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				100	100	Rp. 36.535.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4		4	Rp. 2.960.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	Rp. 2.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1		1	Rp. 2.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1				1	Rp. 1.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1	1	Rp. 1.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3			0	3	Rp. 3.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	1	1	Rp. 22.500.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.8 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor			0	1	1	Rp. 2.075.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 2.825.858.731	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	21				21	Rp. 2.477.695.131	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	5	0	0	0	5	Rp. 348.163.600	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 122.690.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		1	1		2	Rp. 77.840.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	2	2	1	8	Rp. 24.550.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	30	30	0	60	Rp. 20.300.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 352.184.915	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi (Paket)				1	1	Rp. 9.927.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		2	Rp. 120.040.585	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		2	Rp. 31.967.330	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4				4	Rp. 11.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat (Laporan)	10	10	10	10	40	Rp. 179.250.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 707.864.999	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.5.1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	1	1	3	Rp. 272.925.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	0	9	0	0	9	Rp. 209.939.999	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	0	0	1	Rp. 225.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 77.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				1	1	Rp. 5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	3	12	Rp. 72.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 308.128.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10				10	Rp. 158.360.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya Yang Dipelihara (Unit)	0	10	10	6	26	Rp. 27.980.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		1			1	Rp. 121.788.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian

Muara Sabak, 22 September 2025

Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Rina Mariana, S.Kom
 Pembina Tingkat I / IV.b
 NIP. 198209152006042012